

Nama : Fatma wati
NPM : 2213053270
Kelas : 2B
Matkul : Pendidikan Kewarganegaraan
SKS : 2 SKS
Dosen Pengampu : Siti Nuraini M.Pd.

Hari/Tgl : Senin, 20 Maret 2023

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab:

Ada beberapa pihak yang mengkritik isi dari UU Cipta Kerja karena dianggap mengancam hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Namun, setiap revisi UU yang diajukan ke MK akan diuji terhadap Konstitusi dan MK akan memutuskan apakah revisi tersebut sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Jika MK menemukan bahwa revisi UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan Konstitusi, maka MK dapat membatalkan atau mengoreksi bagian dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, revisi UU Cipta Kerja yang sesuai dengan Konstitusi tidak akan mengancam keberadaan Konstitusi Indonesia, tetapi sebaliknya, akan memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

Konsep berbangsa dan bernegara yang harus diperbaiki berdasarkan kontroversi seputar UU Cipta Kerja di Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi.

- Pertama, perlu diperbaiki sistem legislasi dan proses pengambilan keputusan di Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa UU Cipta Kerja dihasilkan dengan proses yang tidak transparan dan melibatkan kepentingan pihak tertentu tanpa memperhatikan keseimbangan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses legislasi dan pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi buruh, pengusaha, dan

masyarakat sipil secara luas

- Kedua, perlu ada perbaikan dalam perlindungan hak-hak buruh dan kesejahteraan pekerja. Beberapa kelompok masyarakat, termasuk organisasi buruh, telah menunjukkan kekhawatiran bahwa UU Cipta Kerja dapat mengancam hak-hak buruh dan mengurangi perlindungan pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan ekonomi yang diadopsi memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, termasuk hak-hak buruh dan kesejahteraan pekerja.
- Ketiga, diperlukan perbaikan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ada kekhawatiran bahwa UU Cipta Kerja dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, dan bahwa penegakan hukum mungkin tidak efektif dalam menangani pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar undang-undang dan kebijakan yang diadopsi dapat dijalankan secara efektif dan tidak melanggar hak asasi manusia dan lingkungan.
- Keempat, diperlukan perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ada kekhawatiran bahwa UU Cipta Kerja mungkin mengancam kebebasan pers dan akses informasi publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah sehingga kebijakan publik dapat diakses dan dievaluasi oleh masyarakat.

Demikianlah beberapa masalah yang perlu diperbaiki dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia, terutama sehubungan dengan kontroversi seputar UU Cipta Kerja. Namun, perbaikan ini tentu saja tidak terbatas hanya pada masalah tersebut, melainkan harus melibatkan berbagai masalah lain yang terkait dengan penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab:

Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk

membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988). Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab:

Contoh perilaku inkonstitusional pejabat pemerintah antara lain:

1. Korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan yang mendiskriminasi kelompok tertentu.
3. Pelanggaran hukum dan pelanggaran aturan yang ditetapkan dalam konstitusi negara.
4. Manipulasi proses pemilihan umum atau pelaksanaan tindakan yang merugikan hak pilih rakyat.

Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas tugasnya, setiap perilaku yang melanggar Konstitusi harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, ketika pejabat publik menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki perilaku dan berdamai dengan masyarakat, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Namun, setiap kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan masyarakat harus diancam dengan pidana yang setinggi-tingginya menurut undang-undang yang berlaku tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan untuk menghormati hak asasi manusia yang menjadi dasar konstitusi negara.

